

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945 merupakan cita-cita mulia bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan.<sup>1</sup>

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat multidimensi karena dalam menanggulangnya masalah yang dihadapi bukan saja terbatas pada hal-hal

---

<sup>1</sup> Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Misklafikasi Orang Miskin* (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2015), 1.

menyangkut hubungan sebab akibat timbulnya kemiskinan tetapi melibatkan juga preferensi, nilai dan politik. Sejak awal berdiri 11 tahun yang lalu, pemerintah provinsi (Pemrov) Banten telah mempunyai perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan Pemrov Banten antara lain melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri. Ini merupakan dua diantara program nasional yang digunakan secara efektif oleh Pemrov Banten untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).<sup>2</sup>

Sharp, et.al mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul akibat ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul

---

<sup>2</sup>H. Verry M. Arifuzzaman, “Keberhasilan Strategi Pengentasan Kemiskinan Banten”, [https://www.kompasiana.com/Ferry-ariefuzzaman/keberhasilan-strategi-pengentasan-kemiskinan-banten\\_550ad7d6813311f017b1ezge](https://www.kompasiana.com/Ferry-ariefuzzaman/keberhasilan-strategi-pengentasan-kemiskinan-banten_550ad7d6813311f017b1ezge) (diunduh tanggal 15 Februari 2018).

akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.<sup>3</sup>

Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan miskin apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Menurut para ahli ekonomi, peningkatan upah minimum dipercaya meningkatkan standar kehidupan buruh, mengurangi kemiskinan, mendorong perusahaan lebih efisien, sekaligus menciptakan efek beruntun lewat peningkatan konsumsi ke peluang kerja baru. Peningkatan upah minimum juga akan mengurangi beban pemerintah untuk

---

<sup>3</sup>Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan Edisi kelima* (Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN, 2001), 132.

biaya jaminan sosial akibat turunnya kelompok miskin yang disubsidi. Upah yang semakin tinggi mendorong banyak orang memasuki pasar kerja formal dibandingkan bekerja di sektor informal dan ilegal, dan terutama mempercepat penghapusan kebijakan buruh murah menuju kebijakan buruh upah layak.<sup>4</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Kebijakan penetapan upah minimum oleh pemerintah adalah kebijakan yang diterapkan dengan tujuan sebagai jaring pengaman terhadap pekerja atau buruh agar tidak dieksploitasi dalam bekerja dan dan mendapat upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum (KHM). Jika kebutuhan hidup

---

<sup>4</sup>Ari Widiastuti, “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2004-2008”, <https://scholar.google.co.id> (diunduh tanggal 26 Januari 2018).

minimum dapat terpenuhi, maka kesejahteraan pekerja meningkatkan dan terbebas dari masalah kemiskinan.<sup>5</sup>

Selain upah minimum provinsi, ada hal lain yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk miskin yaitu inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus, dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi bagi kelompok yang berpendapatan rendah akan mengalami penurunan daya beli. Jika harga-harga naik secara drastis dalam periode tertentu, maka tingkat kemiskinan juga akan naik. Tingkat kemiskinan naik bila tingkat upah masyarakat tetap sedangkan harga barang-barang naik. Masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan, dengan terjadinya inflasi mengakibatkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.<sup>6</sup>

Menurut Lili Andriani dan Rohani membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara variabel  $X_2$  terhadap  $Y_1$  bahwa variabel inflasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap

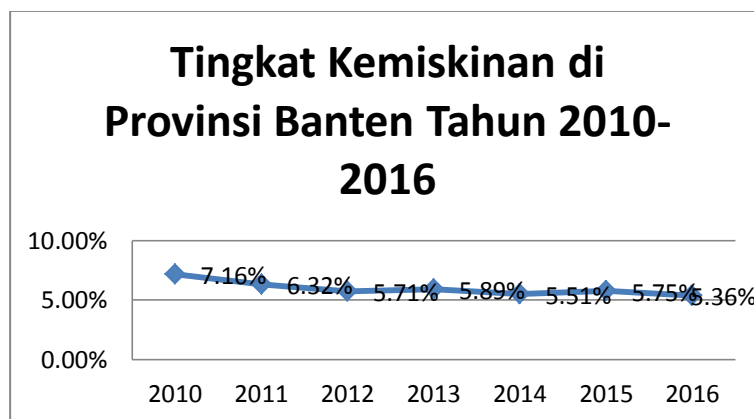
---

<sup>5</sup>Adit Agus Prastyo, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007", <https://academic.microsoft.com/> (diunduh tanggal 26 Januari 2018).

<sup>6</sup>Dahma Amar Ramdhan, dkk, "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan di Kota Samarinda", <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI> (diunduh tanggal 27 Januari 2018).

tingkat kemiskinan, bahwa jika inflasi naik 1% maka jumlah penduduk miskin akan naik sebesar 0,011 di Provinsi Jambi.<sup>7</sup> Begitu juga menurut Sudirman dalam penelitiannya bahwa variabel inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan melihat nilai koefisien sebesar 0,049 maka hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% maka akan meningkatkan kemiskinan sebesar 0,049%.<sup>8</sup>

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kemiskinan di Provinsi Banten Tahun 2010-2016**  
(persen)



Sumber: BPS Provinsi Banten

<sup>7</sup> Suirman dan Lili Andriani, "Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi", <https://scholar.google.co.id> (diunduh tanggal 23 Januari 2018).

<sup>8</sup> Rohani, "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Selatan", [academic.research.microsoft.com](http://academic.research.microsoft.com) (diunduh tanggal 26 Januari 2018)

Tingkat kemiskinan di Provinsi Banten pada periode tahun 2010 hingga tahun 2012 mengalami kecenderungan yang menurun, seperti yang terlihat pada tabel 1.1 pada periode tahun 2010 sampai 2012 tingkat kemiskinan turun dari sebesar 7,16 persen pada tahun 2010 menjadi 5,71 persen pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 hingga tahun 2016 tingkat kemiskinan mengalami fluktuasi yang mana terjadi karena harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut juga mengalami fluktuasi, akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin namun penghasilannya berada disekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin.

Kemiskinan di Provinsi Banten sendiri disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang masih di bawah standar di beberapa kabupaten, tingkat pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah serta faktor-faktor ekonomi makro lainnya. Dalam penetapan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 131/2015-2019 disebutkan daerah tertinggal yakni daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Dalam perpres

disebutkan bahwa Provinsi Banten tepatnya di Kabupaten Pandeglang dan Lebak merupakan daerah tertinggal yang menduduki urutan kedelapan setelah daerah-daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba ingin mengetahui apakah variabel upah minimum dan inflasi mempengaruhi variabel tingkat kemiskinan, maka penelitian ini penulis beri judul tentang **“Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2010-2016”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah. Masalah yang akan diteliti diantaranya adalah peningkatan upah minimum yang menjadi salah satu faktor utama terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, masyarakat miskin akan berkurang karena

---

<sup>9</sup> Niken Widya Yunita, “Jokowi Tetapkan Kabupaten Ini Daerah Tertinggal 2015-2019”, <https://m.detik.com/news/berita/3092196/jokowi-tetapkan-ini-daerah-tertinggal-2015-2019> (diunduh 3 Oktober 2018).



memperoleh upah. Akan tetapi, inflasi menjadi salah satu penyebab masyarakat miskin menjadi semakin kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari apabila upah yang mereka terima rendah.

### **C. Pembatasan Masalah**

Dalam menghindari perluasan subjek serta objek penelitian, maka perlu untuk dibuat suatu pembatasan masalah. Tujuannya adalah untuk membatasi arah dan peluasan yang terjadi di dalam penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti membatasi variabel-variabel yang akan dijadikan objek penelitian. Untuk variabel *dependent* atau terikat adalah persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Dan untuk variabel *independent* atau bebas adalah tingkat upah minimum dan tingkat inflasi di Kabupaten-Kota Provinsi banten. Data yang digunakan adalah data panel yaitu penggabungan antara data *time series* dan *cross section* dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 yang bersumber dari situs <http://www.bps.go.id>.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2016?
2. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2016?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum dan inflasi terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2016?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2016?

2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2016?
3. Untuk mengetahui pengaruh antara upah minimum dan inflasi terhadap kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten pada tahun 2010-2016?

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Bagi Penulis sendiri

Melalui penelitian ini penulis mendapatkan pengetahuan yang berharga dan ilmu serta wawasan mengenai upah minimum, inflasi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Banten. Sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik lagi.

2. Bagi Pemerintahan suatu wilayah

Penulis berharap dari penelitian ini dapat berguna bagi pembangunan ilmu dan pengetahuan. Sebagai kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang lembaga yang dituju.

### 3. Bagi Pembaca/ Pihak lain

Diharapkan dapat dijadikan studi perbandingan dalam rangka mengkaji ilmu pengetahuan. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik lagi bagi sivitas akademik UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka pemikiran dapat berupa bagang, deskriptif kualitatif, atau bahkan gabungan keduanya.

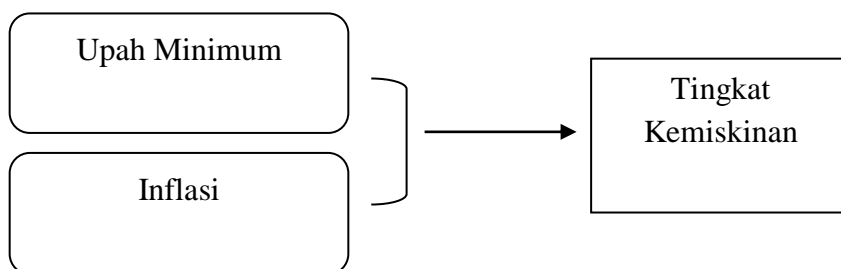
Secara singkat istilah upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan seseorang, oleh karenanya upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya dengan wajar. Upah sebagai imbalan terhadap tenaga dan pikiran yang diberikan pekerja kepada pengusaha, maka pengusaha akan

memberikan upah kepada pekerja sebagai imbalannya. Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisien, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkah upah minimum akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga kesejahteraan juga meningkat dan sehingga terbebas dari kemiskinan.

Inflasi adalah kenaikan harga barang barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Jika harga-harga barang kebutuhan pokok naik secara drastis dalam periode tertentu, maka tingkat kemiskinan akan bertambah. Tingkat kemiskinan bertambah bila tingkat upah masyarakat tetap sedangkan harga barang kebutuhan naik. Masyarakat yang awalnya dapat memenuhi kebutuhan, dengan terjadinya inflasi mengakibatkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup tertentu.

Kemiskinan menyebabkan ketidakmampuan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut miskin atau sering disebut dengan istilah garis kemiskinan. Seseorang termasuk golongan miskin apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.



#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu bab Pendahuluan, bab II. Kajian Pustaka, bab III. Metode penulisan, bab IV. Pembahasan hasil

penulisan, dan V. Kesimpulan dan saran. Untuk masing-masing isi setiap bagian adalah sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan** bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, manfaat penelitian, kerangka penelitian dan sistematika pembahasan.

**Bab II : Kajian teoritis** bab ini membahas tentang kajian pustaka, meliputi pengertian upah minimum, inflasi, kemiskinan dan hubungan antara ketiganya.

**Bab III : Metode Penulisan** bab ini menguraikan secara rinci mengenai objek penelitian, jenis metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan operasional variabel penelitian.

**Bab IV : Kesimpulan** hasil penelitian bab ini membahas uraian hasil penulisan berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasan analisis terpadu.

**Bab IV : Kesimpulan dan saran** bab ini membahas tentang kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan

hasil analisa data dan memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**